KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fintech Rugikan Konsumen KPPU Selidiki Dugaan Kartel
Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Fintech Rugikan Konsumen

KPPU Selidiki Dugaan Kartel

Darmadi Durianto

KOMISI VI DPR mendukung penuh langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki kasus dugaan pengaturan suku bunga pinjaman oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Diduga, kartel suku bunga di *Financial Technologi* (*Fintech*) ini melanggar hukum persaingan usaha.

"Suku bunga pinjaman tidak boleh merugikan rakyat sebagai konsumen. Jangan seenaknya buat aturan suku bunga pinjaman hanya berdasar keuntungan belaka. Kita dukung penuh KPPU yang ingin menyelidiki dugaan adanya kartel suku bunga," tegas anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Darmadi menilai, penetapan suku bunga pinjaman yang dibuat secara sepihak tanpa mengacu pada kaidah-kaidah kepatuhan yang ada sama saja mencekik rakyat. Bahkan, praktik kartel ini, tidak ubahnya dengan perilaku rentenir yang biasa terjadi di masyarakat.

"Apa bedanya mereka sama rentenir kalau seperti itu praktiknya. Rakyat dirugikan karena suku bunga cenderung tinggi. Ini tidak boleh dibiarkan dan KPPU harus segera bertindak," tegasnya.

Darmadi menilai, praktik pengaturan tersebut juga bisa menciptakan persaingan usaha keuangan digital jadi tidak sehat.

"Bisa mengarah pada pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," sebut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Karena itu, Darmadi meminta agar *stakeholder* terkait melakukan pengawasan dan penindakan secara terukur. Menurutnya, praktik rentenir di pinjol ini tidak bisa hanya diserahkan kepada KPPU, tapi juga melibatkan institusi lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"BI juga OJK mestinya bertindak cepat menangani persoalan ini. Jangan sampai baru bertindak ketika rakyat sudah banyak yang dirugikan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Investigasi pada Sekretariat KPPU Gopprera Panggabean mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan praktik pengaturan suku bunga pinjaman kepada konsumen oleh AFPI. Investigasi ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat dari penerapan suku bunga di Fintech.

"Salah satu poin yang menonjol adalah penetapan suku bunga *flat* sebesar 0,8 persen per hari dari jumlah pinjaman yang diterima konsumen. Langkah ini diduga telah diikuti oleh semua anggota AFPI yang terdaftar," kata Gopprera. ■ KAL

"Suku bunga pinjaman tidak boleh merugikan rakyat sebagai konsumen. Jangan seenaknya buat aturan suku bunga pinjaman hanya berdasar keuntungan belaka. Kita dukung penuh KPPU yang ingin menyelidiki dugaan adanya kartel suku bunga.